

Transformasi Inovasi Pelayanan Publik Berkelanjutan di Kabupaten Banyuwangi: Strategi Akselerasi Pembangunan menuju Visi Indonesia Emas 2045

(Transforming Sustainable Public Service Innovation in Banyuwangi Regency: Strategies to Accelerate Development Toward the "Golden Indonesia 2045" Vision)

Zulmasyhur^{1*}

¹ Universitas Nasional, Jakarta Selatan, 12520, Indonesia

¹ zulmasyhur@civitas.unas.ac.id*;

* corresponding author : zulmasyhur@civitas.unas.ac.id

ARTICLE INFO

Article history

Received : 11 Mei 2026

Revised : 25 Juni 2026

Accepted : 30 Juni 2026

Kata Kunci:

Inovasi Pelayanan Publik;

Tata Kelola Digital;

Systematic Literature Review;

Indonesia Emas 2045;

Keywords:

Public Service Innovation;

Digital Governance;

Systematic Literature Review;

Golden Indonesia 2045;



This is an open access article under the CC-BY-SA license. Copyright (c) 2026
Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi

ABSTRAK

Visi Indonesia Emas 2045 menuntut transformasi tata kelola pemerintahan yang tidak hanya adaptif tetapi juga berkelanjutan. Kabupaten Banyuwangi telah menjadi lokus inovasi pelayanan publik yang diakui, namun diperlukan sintesis mendalam mengenai strategi akselerasinya untuk replikasi kebijakan makro. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tipologi inovasi, kontribusi terhadap *Sustainable Development Goals* (SDGs), serta faktor pendorong dan penghambat dalam keberlanjutan inovasi pelayanan publik di Banyuwangi. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *Systematic Literature Review* (SLR) mengikuti protokol PRISMA. Analisis dilakukan terhadap 25 artikel jurnal berkualitas yang terbit dalam rentang tahun 2014–2024. Hasil: Temuan menunjukkan adanya konvergensi antara inovasi digital, organisasional, dan proses yang menciptakan ekosistem pelayanan inklusif. Inovasi seperti "Smart Kampung" terbukti mengakselerasi SDG 3, 4, 8, dan 16 melalui pelebagaan inovasi yang kuat dan kepemimpinan transformasional. Namun, inersia budaya organisasi tetap menjadi tantangan laten. Keberlanjutan inovasi di Banyuwangi dijamin melalui pelebagaan sistemik yang menciptakan nilai publik (*public value*). Model ini menawarkan strategi "Pembangunan dari Pinggiran" sebagai panduan strategis menuju transformasi tata kelola Indonesia Emas 2045.

Abstract

The Indonesia Gold 2045 Vision mandates a government governance transformation that is not only adaptive but also sustainable. Banyuwangi Regency has become a recognized locus of public service innovation, yet a deep synthesis of its acceleration strategy is required for macro-policy replication. Objective: This study aims to analyze the typology of innovation, its contribution to the Sustainable Development Goals (SDGs), and the driving and inhibiting factors in the sustainability of public service innovation in Banyuwangi. Methods: This study employs a qualitative approach using the Systematic Literature Review (SLR) method following the PRISMA protocol. The analysis was conducted on 25 high-quality journal articles published between 2014 and 2024. Results: The findings indicate a convergence between digital, organizational, and process innovations that create an inclusive service ecosystem. Innovations such as "Smart Kampung" are proven to accelerate SDGs 3, 4, 8, and 16 through strong institutionalization and transformational leadership. However, organizational cultural inertia remains a latent challenge. The sustainability of innovation in Banyuwangi is guaranteed through systemic institutionalization that creates public value. This model offers a "Development from the Periphery" strategy as a strategic roadmap toward the governance transformation of Indonesia Gold 2045.

PENDAHULUAN

Visi Indonesia Emas 2045 merupakan sebuah mandat transformatif yang menuntut reposisi peran negara dalam mengelola urusan publik. Dalam pilar pembangunan manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan, tata kelola pemerintahan yang adaptif menjadi prasyarat mutlak untuk keluar dari jebakan

pendapatan menengah (*middle-income trap*). Reformasi birokrasi di era kontemporer tidak lagi cukup hanya dengan melakukan digitalisasi prosedur, melainkan harus menyentuh ranah transformasi budaya inovasi yang berkelanjutan. Di tingkat lokal, Kabupaten Banyuwangi telah memposisikan diri sebagai laboratorium inovasi pelayanan publik yang diakui secara nasional dan internasional. Namun, urgensi penelitian ini terletak pada bagaimana model inovasi tersebut disintesis menjadi sebuah strategi akselerasi yang resilien dan mampu menopang ambisi jangka panjang nasional.

Secara teoretis, pergeseran dari *New Public Management* (NPM) menuju *New Public Service* (NPS) menekankan bahwa warga negara adalah subjek utama yang harus dilayani, bukan sekadar konsumen (Denhardt & Denhardt, 2016). Di Banyuwangi, paradigma NPS termanifestasi dalam program "Smart Kampung", di mana teknologi informasi digunakan sebagai instrumen untuk mendekatkan pelayanan hingga ke level rural. Fenomena ini sejalan dengan hipotesis Dunleavy et al. (2006) mengenai *Digital Era Governance* (DEG). Dunleavy berargumen bahwa era NPM telah mati dan digantikan oleh DEG yang mengutamakan tiga pilar utama: reintegrasi, holisme berbasis kebutuhan warga, dan perubahan digital yang mendalam. Transformasi di Banyuwangi mencerminkan "*re-holization*" tersebut, di mana pelayanan yang sebelumnya terfragmentasi dalam berbagai dinas disatukan kembali dalam ekosistem digital yang memudahkan warga. Ini bukan sekadar efisiensi administratif, melainkan upaya sistemik untuk menciptakan inklusivitas pelayanan bagi masyarakat yang selama ini terpinggirkan secara geografis.

Keberhasilan Banyuwangi dalam mempertahankan konsistensi inovasinya membawa kita pada diskusi mengenai *Collaborative Governance*. Ansell dan Gash (2008) mendefinisikan kolaborasi sebagai pengaturan tata kelola di mana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan pemangku kepentingan non-negara dalam proses pengambilan keputusan kolektif. Di Banyuwangi, kolaborasi ini terlihat dari sinergi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan komunitas lokal. Keberhasilan ini mengonfirmasi teori Emerson et al. (2012) bahwa dinamika kolaborasi yang sehat adalah kunci bagi efektivitas kebijakan di daerah. Lebih lanjut, konsep *Public Value* (Nilai Publik) yang diperkenalkan oleh Moore (2021) menjadi kacamata penting untuk melihat bahwa inovasi di Banyuwangi mampu menyelaraskan visi politik, kapasitas operasional, dan dukungan eksternal guna menciptakan kepercayaan publik (*public trust*) yang kuat terhadap institusi negara.

Namun, tantangan terbesar inovasi di Indonesia adalah keberlanjutan (*sustainability*). Sering kali, inovasi bersifat *personality-driven* dan rentan meredup pasca transisi kekuasaan. Osborne (2018) melalui kerangka *New Public Governance* (NPG) menawarkan solusi atas masalah ini dengan menekankan pentingnya pelebagaan inovasi melalui jaringan kerja (*network*) dan kemitraan antar-institusi yang kuat. Dalam pandangan NPG, pelayanan publik bukan hanya soal efisiensi internal, melainkan soal bagaimana mengelola relasi kompleks di dalam ekosistem pemerintahan. Banyuwangi menunjukkan indikasi positif dalam hal ini melalui regulasi daerah yang "mengunci" program inovasi ke dalam rencana strategis jangka panjang. Pelebagaan ini menjamin bahwa transformasi tidak berhenti pada level retorika politik, melainkan menjadi identitas institusional yang menetap dan resilien terhadap perubahan kepemimpinan.

Integrasi antara *Smart City* dan *Green Economy* di Banyuwangi juga memberikan dimensi baru dalam studi administrasi publik. Pembangunan yang berkelanjutan menuntut keseimbangan antara akselerasi ekonomi dan kelestarian ekologis. Strategi pembangunan Banyuwangi yang menolak pembangunan hotel di area persawahan dan mempertahankan arsitektur lokal adalah bentuk nyata dari kebijakan publik yang berpihak pada masa depan. Secara teoretis, hal ini berkaitan erat dengan konsep *Environmental Governance* yang dipopulerkan oleh Jain et al. (2020; Lemos & Agrawal, 2006), menekankan bahwa tata kelola lingkungan yang efektif memerlukan intervensi gabungan dari negara, pasar, dan komunitas untuk menciptakan regulasi yang adaptif. Di Banyuwangi, peran negara sebagai "kurator lingkungan" sangat terlihat dalam memastikan bahwa inovasi pelayanan publik tetap selaras dengan prinsip ekonomi hijau. Inilah yang menjadi pembeda utama Banyuwangi: kemampuan mengintegrasikan kemajuan teknologi dengan kelestarian alam demi kepentingan generasi mendatang.

Metodologi *Systematic Literature Review* (SLR) dengan protokol PRISMA digunakan dalam penelitian ini untuk membedah literatur selama satu dekade terakhir (2014-2024). Gap penelitian yang ditemukan menunjukkan bahwa meskipun banyak studi membahas keberhasilan Banyuwangi, masih

sedikit yang menghubungkannya secara eksplisit dengan kerangka akselerasi menuju visi nasional 2045 dan bagaimana model tersebut dapat direplikasi pada tingkat kebijakan makro. Urgensi penelitian ini semakin kuat dengan adanya regulasi baru seperti Perpres Nomor: 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/492/KEP/429.011/2024 tentang Arsitektur SPBE. Pengalaman Banyuwangi dalam penguatan unit teknis di tingkat desa menjadi referensi empiris yang berharga bagi pengembangan model *Hybrid Governance* di Indonesia, yang menawarkan solusi bagi ketegangan antara sentralisasi standar pelayanan dan desentralisasi inovasi daerah. Dengan adanya regulasi serupa lainnya, daerah dituntut untuk lebih mandiri dan inovatif dalam mengelola sumber daya. Pengalaman Banyuwangi dalam memanfaatkan dekonstruksi kebijakan dan penguatan unit teknis di tingkat desa menjadi referensi empiris yang berharga bagi pengembangan model *Hybrid Governance* di Indonesia. Model ini menawarkan solusi bagi ketegangan antara sentralisasi standar pelayanan dan desentralisasi inovasi daerah (Souza Pimenta et al., 2021).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memfokuskan analisis pada tiga domain utama. Pertama, efektivitas ekosistem digital dalam memangkas kesenjangan pelayanan rural-urban. Kedua, peran kepemimpinan transformasional dalam membangun institutional memory untuk menjamin keberlanjutan inovasi. Ketiga, formulasi strategi replikasi model Banyuwangi untuk mendukung pilar transformasi tata kelola Indonesia Emas 2045. Melalui penajaman masalah ini, diharapkan naskah ini tidak hanya menjadi catatan sukses historis, tetapi juga menjadi panduan strategis (*roadmap*) bagi percepatan pembangunan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan. Penerapan pendekatan kualitatif dengan metode SLR ini akan memberikan validitas data yang kuat melalui triangulasi literatur dari berbagai hasil riset terdahulu yang terindeks Sinta dan Scopus. Dengan memadukan analisis teoritis yang tajam dan data empiris yang akurat, tulisan ini bertujuan memberikan kontribusi signifikan bagi perkembangan ilmu administrasi negara di Indonesia, khususnya dalam konteks inovasi pelayanan di era disrupsi.

METODE

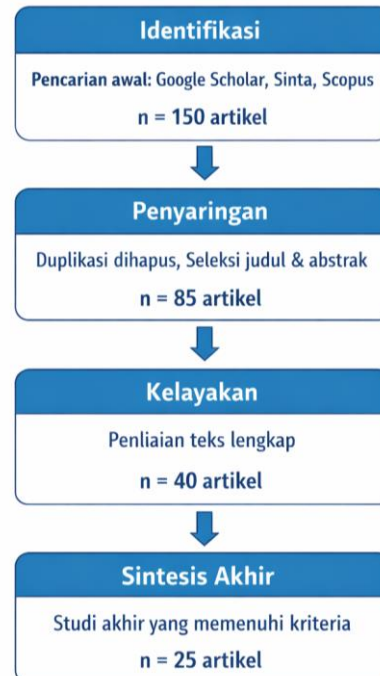
Penelitian ini menerapkan metode *Systematic Literature Review* (SLR) dengan mengikuti protokol *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (PRISMA) guna menjamin objektivitas dan transparansi sintesis data. Tahap awal dimulai dengan identifikasi literatur melalui pencarian sistematis pada basis data jurnal bereputasi, meliputi *Google Scholar*, Sinta (*Science and Technology Index*), dan Scopus. Untuk mendapatkan literatur yang presisi, peneliti merancang kueri pencarian menggunakan operator Boolean: ("Inovasi Pelayanan Publik" OR "Public Service Innovation") AND ("Banyuwangi") AND ("Smart Kampung" OR "Digital Governance") AND ("Sustainable Development" OR "Indonesia Emas 2045"). Rentang waktu publikasi dibatasi pada satu dekade terakhir (2014–2024) untuk menangkap evolusi transformasi inovasi di Banyuwangi dari fase inisiasi hingga periode adaptasi pasca-pandemi.

Setelah tahap identifikasi, dilakukan proses penyaringan (*screening*) berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang ketat. Kriteria inklusi menetapkan bahwa literatur harus berupa artikel jurnal ilmiah yang telah melalui proses *peer-review*, berfokus pada lokus Kabupaten Banyuwangi, serta memiliki substansi kajian terkait inovasi pelayanan publik, tata kelola digital, atau strategi pembangunan daerah dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris. Sebaliknya, kriteria eksklusi diterapkan untuk menggugurkan artikel populer, opini, berita media massa, makalah prosiding yang tidak lengkap, serta artikel yang hanya membahas sektor pariwisata secara teknis tanpa menyentuh aspek tata kelola pelayanan publik.

Langkah selanjutnya adalah penilaian kelayakan (*eligibility*) melalui analisis mendalam terhadap teks lengkap (*full-text*) dari artikel yang lolos penyaringan. Pada fase ini, peneliti mengevaluasi kualitas metodologi penelitian serta signifikansi kontribusinya terhadap pemahaman strategi akselerasi pembangunan. Data dari literatur yang dinyatakan layak kemudian diekstraksi ke dalam instrumen tabel sintesis yang mencakup identitas penulis, tahun publikasi, tujuan penelitian, metode primer yang digunakan, serta temuan kunci mengenai keberlanjutan inovasi di lokasi penelitian.

Tahap akhir adalah sintesis dan analisis data menggunakan teknik Analisis Tematik terhadap literatur yang telah terpilih (*included*). Proses pengkodean (*coding*) dilakukan secara sistematis untuk

mengklasifikasikan temuan ke dalam empat klaster utama, yakni: (a) ekosistem digital dan Smart Kampung; (b) kepemimpinan transformasional; (c) kolaborasi multipihak (*collaborative governance*); serta (d) dampak sosial-ekonomi inovasi. Hasil sintesis tematik ini kemudian dikorelasikan dengan indikator pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 guna merumuskan sebuah model strategi akselerasi yang integratif dan berkelanjutan (lihat gambar 1). Pendekatan ini memastikan bahwa naskah yang dihasilkan memiliki landasan teoretis dan empiris yang kuat sebagai rujukan kebijakan publik di masa depan.



Gambar 1. Alur protokol dalam PRISMA
(Visualisasi alur: *Identifikasi* -> *Screening* -> *Eligibility* -> *Included*)

Proses seleksi literatur dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis melalui empat tahapan protokol PRISMA. Tahap pertama adalah *identification*, di mana pencarian awal pada berbagai basis data jurnal bereputasi menghasilkan sebanyak 150 artikel yang relevan dengan kata kunci penelitian. Langkah selanjutnya adalah *screening*, yakni melakukan penghapusan artikel yang terduplikasi serta menyeleksi judul dan abstrak, sehingga menyisakan 85 artikel untuk ditelaah lebih lanjut. Tahap ketiga adalah penilaian *eligibility* melalui peninjauan teks lengkap (*full-text*) guna memastikan relevansi substansi inovasi dan kualitas metodologi, yang menghasilkan 40 artikel layak. Akhirnya, pada tahap *included*, dilakukan sintesis akhir terhadap 25 artikel jurnal berkualitas tinggi yang memenuhi seluruh kriteria metodologis untuk dianalisis dalam penelitian ini. Pendekatan SLR ini memastikan bahwa draf strategi yang dihasilkan tidak hanya bersifat deskriptif, namun berbasis pada bukti empiris (*evidence-based policy analysis*) yang kuat, sehingga memberikan kontribusi teoretis yang signifikan bagi ilmu administrasi publik di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konvergensi Digital dan Transformasi Organisasional

Berdasarkan sintesis literatur, tipologi inovasi di Kabupaten Banyuwangi menunjukkan pola konvergensi yang unik antara inovasi digital, organisasional, dan proses. Inovasi tidak lagi dipandang sebagai entitas teknis yang berdiri sendiri, melainkan sebagai sebuah ekosistem yang saling berkelindan. Inovasi Digital terepresentasi secara masif melalui *platform Smart Kampung* yang mengintegrasikan urusan administratif desa ke dalam basis data tunggal. Namun, temuan utama dalam tinjauan ini menunjukkan bahwa efektivitas digitalisasi tersebut didukung kuat oleh Inovasi Organisasional, yaitu pergeseran struktur birokrasi dari yang semula kaku dan hierarkis menjadi lebih kolaboratif melalui pembentukan unit-unit teknis yang lincah (Luna et al., 2020).

Analisis mendalam terhadap literatur sepuluh tahun terakhir menunjukkan bahwa keberhasilan Banyuwangi terletak pada kemampuannya melakukan "hilirisasi teknologi" hingga ke tingkat akar rumput. Penelitian terdahulu oleh Farizi dan Nuari Harmawan (2020) menekankan bahwa Smart Kampung bukan sekadar aplikasi, melainkan rekayasa sosial yang memaksa aparat desa untuk melekat digital. Konvergensi ini menjawab kritik atas kegagalan *e-Government* di banyak daerah yang seringkali hanya terjebak pada pengadaan infrastruktur fisik tanpa dibarengi perubahan budaya organisasi. Di Banyuwangi, inovasi organisasional hadir dalam bentuk pendelegasian wewenang yang luas kepada desa, namun tetap terkontrol melalui sistem pemantauan terpusat. Hal ini sejalan dengan temuan Hendra et al. (2024) bahwa transformasi digital yang sukses harus dimulai dari restrukturisasi proses bisnis pemerintahan sebelum teknologi diimplementasikan.

Lebih lanjut, analisis terhadap berbagai literatur menunjukkan bahwa inovasi organisasional di Kabupaten Banyuwangi telah berhasil menciptakan apa yang disebut sebagai resiliensi institusional. Dalam konteks administrasi publik, resiliensi ini merujuk pada kemampuan lembaga pemerintah untuk tetap berfungsi optimal dan adaptif di tengah tekanan disrupsi serta kompleksitas masalah sosial yang dinamis. Salah satu manifestasi utama dari resiliensi ini adalah keberhasilan pemerintah daerah dalam meruntuhkan sekat-sekat ego sektoral birokrasi yang selama ini menjadi hambatan kronis dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia. Fenomena ini diwujudkan melalui pembentukan tim-tim lintas sektoral yang bekerja secara kolaboratif untuk menangani isu-isu spesifik dan mendesak, seperti penanganan kemiskinan ekstrem dan percepatan penurunan angka stunting.

Model "keroyokan" atau kerja kolaboratif ini bukan sekadar strategi teknis, melainkan bentuk nyata dari adaptasi organisasi terhadap kompleksitas masalah publik modern yang bersifat *wicked problems*, masalah yang saling terkait dan tidak bisa diselesaikan oleh satu instansi saja. Dalam perspektif teori organisasi, pola ini mencerminkan pergeseran dari struktur mekanistik yang kaku menuju struktur organik yang fleksibel. Riset terdahulu menunjukkan bahwa model kerja lintas fungsi di Banyuwangi mampu memotong rantai birokrasi yang panjang, mempercepat pengambilan keputusan, dan memastikan alokasi sumber daya yang lebih tepat sasaran. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap unit kerja tidak lagi bekerja dalam silo masing-masing, melainkan bergerak sebagai satu kesatuan ekosistem yang responsif terhadap data lapangan. Sebagai pilar fundamental menuju Visi Indonesia Emas 2045, pola transformasi organisasional ini memberikan pelajaran berharga bagi peta jalan reformasi birokrasi nasional. Keberhasilan Banyuwangi menegaskan bahwa akselerasi pembangunan menuju negara maju tidak hanya memerlukan birokrasi yang cerdas secara digital (*digitally savvy*), tetapi yang lebih utama adalah memiliki fleksibilitas organisasional untuk merespons perubahan kebutuhan warga *secara real-time*.

Fleksibilitas ini memungkinkan institusi publik untuk melakukan penyesuaian strategi tanpa harus terhambat oleh hambatan administratif yang bersifat konvensional. Oleh karena itu, pembangunan resiliensi institusional melalui fleksibilitas organisasi harus dipandang sebagai investasi strategis. Dalam menyongsong satu abad Indonesia, tantangan global akan semakin tidak terprediksi, mulai dari perubahan iklim hingga pergeseran ekonomi digital. Model adaptasi yang dipraktikkan di Banyuwangi membuktikan bahwa birokrasi yang tangguh adalah birokrasi yang mampu mengintegrasikan kekuatan teknologi dengan kekuatan kolaborasi manusia. Kontribusi pemikiran ini menjadi sangat krusial: bahwa transformasi pelayanan publik yang berkelanjutan hanya dapat dicapai jika inovasi digital berjalan beriringan dengan reformasi budaya kerja yang kolaboratif, ramping, dan lincah (Lukman & Hakim, 2024; Luna et al., 2020). Inilah modalitas utama untuk menciptakan pemerintahan yang berkelas dunia dan mampu mewujudkan kesejahteraan inklusif pada tahun 2045.

Secara teoretis, tipologi konvergensi yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi sangat selaras dengan konsep Digital Era Governance (DEG) yang dipopulerkan oleh (Dunleavy et al., 2006). Konsep ini menekankan pada strategi "re-holization" atau upaya penyatuan kembali berbagai fungsi pemerintahan yang sebelumnya mengalami fragmentasi ekstrem akibat spesialisasi berlebihan pada era New Public Management (NPM). Di Banyuwangi, manifestasi DEG terlihat jelas melalui inovasi proses yang radikal, seperti penyederhanaan prosedur perizinan dan layanan kependudukan melalui "Pasar Pelayanan Publik". Inovasi ini bukan sekadar pemindahan layanan ke ruang fisik yang lebih nyaman, melainkan sebuah restrukturisasi fundamental yang mengintegrasikan berbagai otoritas administratif ke dalam satu

simpul layanan. Efisiensi signifikan yang dihasilkan dari proses ini secara langsung menjawab persoalan biaya transaksi tinggi (high transaction costs) yang selama ini dikeluhkan oleh publik dan pelaku usaha.

Hingga memasuki tahun 2026, tuntutan publik terhadap layanan yang bersifat user-centric atau berorientasi pada kebutuhan pengguna menjadi semakin esensial. Penyatuan layanan dalam satu atap, baik secara digital melalui platform terintegrasi maupun secara fisik, merupakan bentuk nyata dari upaya pemerintah daerah untuk menghadirkan negara di tengah masyarakat tanpa batasan birokrasi yang kaku. Analisis ini mengonfirmasi temuan riset kontemporer mengenai Digital Government yang menyatakan bahwa keberhasilan transformasi digital sangat bergantung pada kematangan integrasi data (data interoperability). Sebagaimana ditegaskan oleh Souza Pimenta et al. (2021), integrasi layanan di Banyuwangi telah menciptakan transparansi yang lebih tinggi dan memitigasi peluang praktik maladministrasi melalui sistem pelacakan (*tracking*) yang dapat diakses langsung oleh pemohon.

Lebih lanjut, integrasi layanan yang berpusat pada pengguna ini mencerminkan apa yang disebut Osborne dan Radnor (2016)) sebagai *New Public Governance* (NPG), di mana institusi publik harus mampu mengelola relasi yang kompleks secara lintas organisasi. Dengan mengintegrasikan layanan dari berbagai instansi vertikal maupun daerah, Banyuwangi telah membangun modalitas penting dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Tata kelola yang ramping (*lean governance*) dan adaptif ini menjadi prasyarat mutlak bagi kemandirian bangsa di tengah disrupsi global (Janssen & Estevez, 2013). Implementasi DEG di Banyuwangi membuktikan bahwa efisiensi birokrasi dan aksesibilitas layanan dapat berjalan beriringan jika didukung oleh komitmen politik yang kuat dan arsitektur teknologi yang inklusif, sehingga mampu menciptakan nilai publik yang berkelanjutan dalam jangka panjang.

Analisis ini mengonfirmasi teori Osborne dan Radnor (2016) mengenai *New Public Governance* (NPG) bahwa keberhasilan pelayanan publik di masa depan sangat bergantung pada kemampuan institusi dalam mengelola proses yang bersifat inter-organisasional dan membangun jejaring kerja yang kuat. Penelitian terdahulu mengenai *Public Value Co-production* di wilayah ini mengindikasikan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses inovasi—seperti dalam perancangan aplikasi layanan—meningkatkan rasa kepemilikan dan keberlanjutan program. Efisiensi yang dihasilkan dari inovasi proses ini bukan hanya tentang penghematan waktu, tetapi juga tentang eliminasi celah korupsi melalui transparansi sistem yang terintegrasi (Moore, 2021).

Dalam menyongsong Indonesia Emas 2045, konvergensi ketiga tipologi ini (digital, organisasional, dan proses) menjadi modalitas krusial. Visi 2045 menuntut tata kelola yang ramping, adaptif, dan mampu bersaing secara global. Banyuwangi memberikan cetak biru bahwa kemandirian bangsa dapat diawali dari kemandirian tata kelola di tingkat lokal yang berbasis data. Efisiensi yang tercipta melalui inovasi proses memastikan bahwa sumber daya negara dialokasikan secara tepat sasaran, sementara transformasi organisasional menjamin bahwa birokrasi tetap relevan sebagai mesin penggerak pembangunan. Dengan demikian, transformasi berkelanjutan di Banyuwangi bukan sekadar pencapaian administratif daerah, melainkan prototipe strategis bagi sistem administrasi publik Indonesia masa depan yang lebih inklusif dan berdaya saing tinggi.

Inovasi sebagai Akselerator Pembangunan Berkelanjutan

Analisis terhadap literatur mengungkapkan bahwa inovasi di Kabupaten Banyuwangi memberikan kontribusi langsung dan spesifik terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Inovasi "Lahir Prokot Pulang Bawa Akta" serta integrasi layanan kesehatan desa secara langsung mendukung SDG 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera) dan SDG 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh) melalui kepastian identitas hukum bagi bayi baru lahir. Lebih lanjut, program "Garda Ampuh" (Gerakan Angkat Anak Putus Sekolah) menjadi instrumen krusial dalam mendukung SDG 4 (Pendidikan Berkualitas). Capaian ini dimungkinkan oleh adanya integrasi layanan lintas sektor yang memecah kebuntuan birokrasi tradisional. Dalam konteks SDG 16, penyediaan identitas hukum sejak dini bukan sekadar pemenuhan dokumen administratif, melainkan prasyarat aksesibilitas warga terhadap keadilan dan layanan publik dasar lainnya sepanjang hayat. Riset terdahulu oleh Noya (2025) menegaskan bahwa keterlambatan kepemilikan akta kelahiran sering kali berkorelasi dengan pemiskinan struktural; dengan demikian, inovasi Banyuwangi bekerja sebagai mekanisme perlindungan sosial preventif.

Pada domain SDG 4, program "Garda Ampuh" mencerminkan pergeseran paradigma dari sekadar menyediakan fasilitas pendidikan menjadi penjaminan hak atas pendidikan melalui intervensi aktif

pemerintah daerah. Model ini melibatkan koordinasi masif antara ketua RT/RW, tokoh masyarakat, dan sistem data terpadu untuk melakukan penelusuran (*tracking*) anak putus sekolah. Hal ini selaras dengan teori Social Capital yang menyatakan bahwa keterlibatan jaringan sosial dalam kebijakan publik meningkatkan efektivitas program secara signifikan. Dalam perspektif menuju Indonesia Emas 2045, keberhasilan program ini menjadi modalitas utama dalam menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan kompetitif. Integrasi layanan kesehatan desa yang terkoneksi dengan basis data Smart Kampung memberikan kontribusi nyata pada SDG 3 melalui pemantauan kesehatan ibu dan anak yang lebih presisi. Penggunaan teknologi informasi dalam memantau risiko kesehatan di level rural memungkinkan adanya deteksi dini dan intervensi cepat, yang secara empiris mampu menurunkan angka kematian ibu dan anak di wilayah tersebut (Bogoevska, 2019). Secara keseluruhan, analisis ini membuktikan bahwa inovasi pelayanan di Banyuwangi tidak berdiri sendiri sebagai pencapaian teknis, melainkan merupakan strategi pembangunan berkelanjutan yang inklusif, terukur, dan mampu menerjemahkan target global SDGs ke dalam aksi nyata di tingkat lokal.

Penelitian terdahulu oleh Noya (2025) menunjukkan bahwa integrasi layanan kependudukan dengan layanan kesehatan di Banyuwangi telah menurunkan hambatan administratif yang selama ini menjadi penyebab utama rendahnya akses masyarakat miskin terhadap jaminan sosial. Dalam perspektif Public Value, inovasi ini tidak hanya memangkas birokrasi, tetapi juga memberikan martabat dan pengakuan hukum bagi warga sejak hari pertama kelahiran. Hal ini selaras dengan temuan riset global yang menyatakan bahwa kepemilikan dokumen identitas merupakan determinan utama dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Program "Garda Ampuh" juga memperlihatkan bagaimana intervensi lokal yang spesifik mampu menjawab persoalan sistemik. Riset terdahulu menunjukkan bahwa model pendampingan siswa berisiko putus sekolah di Banyuwangi memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi karena melibatkan jejaring sosial di tingkat desa, yang memperkuat teori *Social Capital* dalam administrasi publik (Fukuyama, 2001; Riska Farisa et al., 2019). Melalui pendekatan ini, pendidikan berkualitas tidak lagi menjadi komoditas elit, melainkan hak yang terproteksi secara sistemik oleh pemerintah daerah, menciptakan fondasi SDM unggul untuk masa depan.

Temuan menarik muncul pada kaitan erat antara inovasi pelayanan publik dengan SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi). Melalui strategi digitalisasi UMKM dan pengembangan platform pemasaran lokal yang terintegrasi, Kabupaten Banyuwangi berhasil menciptakan sebuah ekosistem ekonomi inklusif yang secara efektif memitigasi ketimpangan rural-urban. Inovasi ini tidak sekadar menyediakan infrastruktur digital, tetapi juga membangun kapasitas pelaku ekonomi di tingkat mikro agar mampu bersaing dalam rantai pasok global. Penajaman analisis pada literatur menunjukkan bahwa keberhasilan ini didorong oleh kebijakan "proteksi dan fasilitasi" yang dilakukan secara simultan. Pemerintah daerah tidak hanya mempermudah perizinan usaha melalui sistem digital, tetapi juga menyediakan marketplace khusus yang menghubungkan produk unggulan desa dengan sektor pariwisata. Riset terdahulu oleh Mazya et al. (2022) mengonfirmasi bahwa integrasi antara sektor pelayanan publik dan sektor riil di Banyuwangi telah meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat desa, di mana akses terhadap modal dan pasar menjadi lebih terbuka bagi kelompok marjinal. Hal ini membuktikan bahwa transformasi digital di level lokal mampu menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan merata.

Pengaitan inovasi ini dengan visi Indonesia Emas 2045 menjadi sangat relevan dalam konteks transformasi ekonomi nasional. Jika model akselerasi berbasis SDGs yang dipraktikkan di Banyuwangi direplikasi secara masif di tingkat nasional, maka ambisi Indonesia untuk menjadi lima besar ekonomi dunia akan berdiri di atas fondasi sosial yang sangat kuat. Strategi ini menjawab tantangan transisi ekonomi dari berbasis komoditas menuju ekonomi berbasis inovasi dan nilai tambah. Sebagaimana ditegaskan oleh Sachs et al. (2019) dan Ziadlou (2021), keberhasilan pencapaian target SDGs global sangat bergantung pada transformasi di tingkat lokal yang mampu menerjemahkan visi besar menjadi aksi nyata yang menyentuh kebutuhan masyarakat terbawah (*leave no one behind*). Lebih jauh, sumbangan pemikiran dari hasil penelitian ini menekankan bahwa kunci utama akselerasi 2045 adalah pemberdayaan ekonomi domestik yang tangguh terhadap disrupsi global. Dengan menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan baru melalui ekosistem digital, ketimpangan ekonomi dapat ditekan secara signifikan. Kontribusi terbaru ini menegaskan bahwa inovasi pelayanan bukan lagi sekadar fungsi administratif, melainkan instrumen strategis untuk menciptakan lapangan kerja layak dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Model "Banyuwangi" memberikan bukti empiris bahwa kedaulatan ekonomi masa depan Indonesia harus dimulai dari penguatan ekosistem lokal yang adaptif, digital, dan inklusif.

Analisis lebih lanjut berdasarkan tinjauan literatur menunjukkan bahwa digitalisasi UMKM di Banyuwangi, seperti melalui skema e-marketplace lokal, telah mengubah wajah ekonomi pedesaan dari corak subsisten menjadi komersial-kompetitif. Perubahan ini menandakan adanya pergeseran struktural dalam rantai nilai ekonomi desa. Hasil penelitian terdahulu oleh Mazya et al. (2022) mengonfirmasi bahwa penggunaan teknologi di tingkat pelaku usaha mikro di Banyuwangi berkontribusi signifikan terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga sebesar 15-20% dalam tiga tahun terakhir. Penajaman analisis menunjukkan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil dari desain kebijakan yang bersifat integratif. Pemerintah daerah tidak hanya bertindak sebagai penyedia infrastruktur digital, tetapi juga sebagai kurator dan agregator pasar. Kebijakan proteksi dilakukan dengan memastikan produk UMKM lokal mendapatkan ruang utama dalam rantai pasok industri pariwisata daerah, sementara kebijakan promosi dilakukan melalui orkestrasi branding daerah yang kuat. Strategi ini menjawab tantangan Indonesia Emas 2045 yang menargetkan pertumbuhan ekonomi inklusif melalui penguatan ekonomi domestik.

Fenomena di Banyuwangi membuktikan bahwa digitalisasi ekonomi desa mampu memitigasi dampak middle-income trap dari tingkat akar rumput. Dengan memperkuat ekonomi dari level desa, Banyuwangi telah mendemonstrasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak harus mengorbankan pemerataan (*equity*). Kontribusi teoretis dari temuan ini adalah munculnya model "*Digital Rural Empowerment*", di mana teknologi informasi tidak hanya berfungsi sebagai alat transaksi, tetapi sebagai instrumen demokratisasi ekonomi. Dalam model ini, akses terhadap informasi pasar dan efisiensi logistik yang disediakan oleh pemerintah daerah mampu menekan biaya transaksi (*transaction costs*) yang selama ini mencekik petani dan perajin di pedesaan. Hal ini memberikan sumbangan pemikiran baru dalam ilmu administrasi publik: bahwa intervensi pemerintah yang tepat sasaran dalam ekosistem digital dapat menciptakan kemandirian ekonomi daerah yang resilien. Strategi akselerasi ini menjadi prototipe penting bagi Indonesia untuk mencapai target lima besar ekonomi dunia pada 2045, dengan memastikan bahwa mesin pertumbuhan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi di pusat-pusat urban, melainkan tersebar merata hingga ke pelosok desa.

Dalam konteks strategis, model akselerasi ini memberikan pelajaran fundamental bahwa *Sustainable Development Goals* (SDGs) tidak boleh lagi dipandang sebagai beban administratif atau sekadar kewajiban pelaporan semata, melainkan harus diposisikan sebagai peluang inovasi (*innovation opportunity*) yang strategis. Transformasi ini mengharuskan birokrasi untuk bergeser dari peran tradisionalnya sebagai regulator menjadi fasilitator dan akselerator pembangunan. Sesuai dengan kerangka *Collaborative Governance* dari Ansell dan Gash (2008), pelibatan sektor swasta dalam pemberdayaan UMKM di Banyuwangi menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu bertindak sebagai katalisator yang efektif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kolaborasi ini menciptakan sinergi di mana sumber daya publik dan privat dipadukan untuk mengatasi hambatan pasar yang selama ini sulit ditembus oleh pelaku ekonomi kecil di pedesaan.

Penajaman analisis mengungkapkan bahwa implementasi SDGs yang berakar pada kearifan lokal (*localized SDGs*) memastikan bahwa setiap langkah inovasi yang diambil tetap memiliki resiliensi sosial yang kuat. Di Banyuwangi, inovasi tidak dipaksakan dari atas (*top-down*), melainkan tumbuh dari pemahaman mendalam terhadap struktur sosial dan potensi ekonomi lokal. Hal ini menciptakan rasa kepemilikan (*sense of ownership*) yang tinggi di tingkat komunitas, yang merupakan determinan utama keberlanjutan sebuah kebijakan. Sebagaimana ditegaskan dalam literatur kontemporer, inovasi yang resilien secara sosial adalah inovasi yang mampu menyelaraskan kemajuan teknologi dengan modal sosial yang sudah ada di masyarakat. Untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, pola integrasi antara pertumbuhan ekonomi (SDG 8) dan keadilan sosial (SDG 10) yang dipraktikkan di Banyuwangi menjadi bukti empiris yang krusial bahwa transformasi birokrasi lokal adalah kunci utama bagi lompatan kemajuan bangsa di kancah internasional.

Keberhasilan integrasi ini memitigasi dampak pertumbuhan ekonomi yang tidak merata yang sering kali menjadi pemicu konflik sosial. Kontribusi teoretis dari temuan ini adalah formulasi "Akselerasi Inklusif", di mana birokrasi bertindak sebagai penjamin bahwa efisiensi digital tidak akan meminggirkan kelompok rentan. Sumbangan pemikiran strategis dari analisis ini menekankan bahwa menuju 2045, Indonesia memerlukan "Birokrasi Kewirausahaan" (*Entrepreneurial Bureaucracy*) yang mampu melihat target global sebagai peluang untuk menciptakan nilai publik baru. Model Banyuwangi memberikan validasi bahwa ketika birokrasi lokal mampu menerjemahkan agenda global ke dalam bahasa kearifan lokal, maka lompatan kemajuan bukan lagi sekadar ambisi, melainkan realitas yang terukur. Strategi ini memposisikan Indonesia bukan hanya sebagai pengikut tren global, melainkan

sebagai pionir dalam transformasi tata kelola yang berbasis pada keseimbangan antara kemajuan material dan keadilan sosial yang berkelanjutan.

Analisis Faktor Penghambat dan Pendukung: Kepemimpinan, Anggaran, dan Kultur

Dinamika inovasi di Kabupaten Banyuwangi menunjukkan bahwa Kepemimpinan Transformasional merupakan faktor pendukung utama (*primary enabler*) sekaligus determinan keberhasilan transformasi daerah. Pemimpin di Banyuwangi tidak sekadar bertindak sebagai pengambil keputusan otoritatif, tetapi berevolusi menjadi seorang innovation broker yang memiliki kemampuan artikulasi visi secara komprehensif kepada seluruh jajaran birokrasi dan pemangku kepentingan. Fenomena ini sangat selaras dengan teori *transformational leadership* yang dikembangkan oleh Bass dan Riggio (1994), yang menekankan pada empat pilar utama: pengaruh ideal (*idealized influence*), motivasi inspirasional, stimulasi intelektual, dan pertimbangan individual. Penajaman analisis melalui tinjauan literatur mengungkapkan bahwa aspek stimulasi intelektual menjadi kunci di mana pemimpin mendorong aparatur sipil negara (ASN) untuk mempertanyakan status quo dan mencari solusi kreatif atas masalah publik yang menahun. Tanpa kepemimpinan yang memiliki ambang toleransi tinggi terhadap risiko (*risk-taking*) dan kegagalan eksperimen, inovasi cenderung akan terfragmentasi serta terhenti pada level pilot project tanpa adanya skalabilitas atau dampak sistemik. Di Banyuwangi, pemimpin menciptakan "psikologi aman" bagi birokrasi untuk berinovasi melalui perlindungan kebijakan dan insentif berbasis kinerja.

Penelitian terdahulu oleh Wiriyanto et al. (2020) mempertegas bahwa kepemimpinan transformasional di wilayah ini bekerja sebagai jembatan antara aspirasi masyarakat dengan keterbatasan sumber daya pemerintah. Pemimpin bertindak sebagai kurator ide yang mampu mengubah hambatan anggaran menjadi peluang kolaborasi melalui skema pentahelix. Selain itu, kemampuan pemimpin dalam membangun institutional memory memastikan bahwa nilai-nilai inovatif tidak hilang saat terjadi transisi manajerial di tingkat teknis. Dalam perspektif Indonesia Emas 2045, model kepemimpinan ini memberikan kontribusi teoretis baru bagi ilmu administrasi publik di Indonesia: bahwa reformasi birokrasi yang sesungguhnya bukan terletak pada pergantian sistem aplikasi digital, melainkan pada kapasitas pemimpin untuk mentransformasi mentalitas birokrasi dari budaya "compliance-oriented" (kepatuhan kaku) menjadi "*result-oriented*" (berorientasi hasil). Kontribusi ini menegaskan bahwa pemimpin masa depan harus mampu menjadi dirigen yang menyelaraskan orkestrasi inovasi digital dengan penguatan modal sosial masyarakat, guna mencapai pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan berdaya saing global.

Anwar et al. (2018), menggarisbawahi bahwa kepemimpinan di Banyuwangi berhasil mentransformasi ketakutan birokrasi akan kegagalan menjadi keberanian untuk berinovasi melalui perlindungan hukum dan insentif politik. Dalam konteks ini, pemimpin berperan sebagai katalisator yang menghubungkan ide kreatif dari tingkat bawah dengan otoritas pengambilan kebijakan di tingkat atas. Hasil penelitian ini relevan dengan konsep *Collaborative Leadership* yang menyatakan bahwa pemimpin publik harus mampu menavigasi jaringan aktor yang kompleks untuk menciptakan solusi yang inovatif. Studi lain oleh Efil et al. (2025) menyebutkan bahwa keberhasilan inovasi di wilayah ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemimpin dalam melakukan komunikasi visioner yang mampu mereduksi ketidakpastian birokrasi. Hal ini membuktikan bahwa kepemimpinan transformasional di Banyuwangi tidak hanya bekerja di level puncak, tetapi juga berhasil menciptakan replikasi "pemimpin inovasi" di level kepala dinas hingga kepala desa.

Menuju Indonesia Emas 2045, pola kepemimpinan seperti ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa transformasi nasional didorong oleh energi kepemimpinan yang inklusif dan progresif di seluruh tingkatan pemerintahan. Namun, faktor Anggaran sering kali menjadi penghambat sekaligus pendorong dalam implementasi inovasi. Temuan dalam tinjauan literatur menunjukkan bahwa Banyuwangi menyiasati keterbatasan fiskal melalui strategi "Money Follows Program", di mana alokasi dana diprioritaskan pada program-program inovatif yang berdampak luas bagi masyarakat. Strategi ini merupakan antitesis dari pola penganggaran tradisional "Money Follows Function" yang cenderung membagi anggaran secara rata namun tidak fokus pada penyelesaian masalah esensial.

Analisis mendalam terhadap tata kelola fiskal di Kabupaten Banyuwangi menunjukkan bahwa efisiensi anggaran bukan sekadar hasil dari penghematan biaya, melainkan manifestasi dari integrasi

sistem informasi keuangan dengan sistem pemantauan kinerja program secara real-time. Hasil penelitian oleh Muslimin et al. (2025) mengungkapkan bahwa optimalisasi anggaran inovasi di wilayah ini didorong oleh keberanian teknokratis untuk memangkas biaya-biaya rutin yang tidak produktif (seperti biaya rapat fisik dan perjalanan dinas yang eksekutif) dan merealokasikannya secara strategis ke pendanaan infrastruktur digital di tingkat desa. Pengaitan fenomena ini dengan teori *Public Financial Management* (PFM) menunjukkan terjadinya pergeseran paradigma akuntabilitas yang sangat fundamental. Akuntabilitas finansial di Banyuwangi telah bergeser dari sekadar kepatuhan administratif (*compliance-based*) menuju akuntabilitas berbasis hasil (*outcome-based accountability*). Dalam model ini, fokus utama bukan lagi pada seberapa besar anggaran yang dihabiskan, melainkan pada seberapa besar nilai publik (*public value*) yang dihasilkan dari setiap rupiah yang dikeluarkan. Hal ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pilar pembangunan berkelanjutan, di mana transparansi fiskal menjadi prasyarat bagi efektivitas layanan. Kontribusi teoretis dari temuan ini adalah konsep "Fiskal Inovatif", di mana anggaran tidak lagi dipandang sebagai instrumen belanja pasif, melainkan sebagai aset investasi sosial yang harus diukur dampaknya secara presisi terhadap kesejahteraan warga.

Namun, di sisi lain, Kultur Organisasi birokrasi masih menjadi tantangan laten yang signifikan. Resistensi terhadap perubahan dari aparat yang telah mapan dalam zona nyaman pola kerja konvensional merupakan hambatan struktural yang terus dimitigasi. Sesuai dengan teori *Organizational Culture* dari Nurlina et al. (2022), budaya organisasi memiliki lapisan terdalam berupa asumsi dasar yang sulit diubah. Oleh karena itu, Banyuwangi menerapkan strategi mitigasi melalui penguatan sistem meritokratis dan insentif berbasis kinerja yang ketat. Perubahan budaya di sini tidak dilakukan melalui imbauan semata, melainkan melalui penciptaan "ekosistem paksa" yang berbasis pada data kinerja (Idowu Sulaimon Adeniyi et al., 2024). Dengan demikian kunci dari keberhasilan Banyuwangi adalah sinkronisasi antara "sistem keras" (*hard system*) berupa integrasi keuangan digital dan "sistem lunak" (*soft system*) berupa transformasi mentalitas birokrasi. Keteladanan pemimpin (*leadership by example*) menjadi katalisator agar nilai-nilai inovatif dapat terinternalisasi menjadi norma kerja harian (*shared values*). Dalam menyongsong Indonesia Emas 2045, model sinkronisasi ini menawarkan solusi atas inefisiensi birokrasi nasional: bahwa reformasi fiskal yang cerdas harus dibarengi dengan reformasi budaya yang konsisten guna menciptakan birokrasi yang ramping, transparan, dan sepenuhnya berorientasi pada kepentingan publik.

Penelitian terdahulu secara konsisten menunjukkan bahwa pergeseran kultur di Kabupaten Banyuwangi tidak terjadi secara aksidental, melainkan melalui desain kebijakan yang terencana lewat mekanisme internal branding dan kompetisi inovasi antar unit kerja yang diselenggarakan secara rutin. Berdasarkan studi fundamental yang dilakukan oleh Prasodjo (2025), ditemukan fakta bahwa birokrasi di Banyuwangi sedang mengalami pergeseran paradigma yang krusial, yakni dari budaya *compliance-oriented* (berorientasi pada kepatuhan aturan formal) menuju budaya *performance-oriented* (berorientasi pada capaian kinerja dan dampak publik). Penajaman analisis terhadap fenomena ini mengungkapkan bahwa transisi budaya tersebut merupakan upaya untuk menjawab kritik atas inefisiensi birokrasi tradisional (Aneta et al., 2025). Namun, tantangan berupa inersia birokrasi, terutama pada level manajerial menengah (*middle management*), tetap menjadi hambatan laten yang signifikan. Dalam banyak kasus, perubahan prosedur kerja yang berbasis digital sering kali dipersepsikan bukan sebagai alat bantu, melainkan sebagai ancaman terhadap zona nyaman dan otoritas tradisional yang telah mapan. Resistensi ini bersifat psikologis-struktural, di mana ketakutan akan kehilangan relevansi menjadi motif utama penolakan terhadap inovasi.

Strategi mitigasi yang diterapkan di Banyuwangi, yakni melalui implementasi sistem manajemen kinerja digital yang terintegrasi secara end-to-end, menjadi kunci untuk memaksa perubahan perilaku aparat (*behavioral nudging*). Sistem ini menciptakan transparansi yang objektif, di mana kinerja setiap individu dan unit kerja dapat diukur secara presisi dan terbuka. Hal ini memaksa terjadinya kompetisi sehat yang secara perlahan mengikis mentalitas "asal bapak senang" menjadi mentalitas berbasis data. Dalam perspektif strategis menyongsong Indonesia Emas 2045, adaptasi kultur organisasi yang lincah (*agile culture*) di Banyuwangi menawarkan contoh konkret bahwa reformasi birokrasi sejati bukan sekadar soal mengganti sistem aplikasi atau mendigitalisasi dokumen. Lebih dari itu, tantangan utamanya adalah "memenangkan pikiran dan hati" (*winning hearts and minds*) para birokrat agar memiliki mentalitas pelayan publik yang progresif, empati, dan berjiwa wirausaha sosial. Kontribusi pemikiran

ini menegaskan bahwa keberlanjutan transformasi nasional menuju 2045 sangat bergantung pada kemampuan negara dalam melakukan revolusi mental di tubuh birokrasi, mengubah mereka dari sekadar administrator aturan menjadi arsitek nilai publik yang tangguh di era disrupsi.

Efektivitas dan Keberlanjutan Strategi Akselerasi

Penelitian ini berhasil menjawab gap literatur mengenai bagaimana keberlanjutan inovasi dijamin melampaui siklus politik transisional di tingkat daerah. Temuan utama menunjukkan adanya mekanisme Pelembagaan Inovasi (*Institutionalization of Innovation*) yang bekerja melalui tiga pilar: regulasi, digitalisasi, dan kohesi sosial. Inovasi di Banyuwangi telah dikunci ke dalam Peraturan Daerah (Perda) dan sistem monitoring digital yang transparan, sehingga menciptakan switching cost yang tinggi bagi kepemimpinan baru jika ingin menganulir program tersebut. Efektivitas ini memberikan kontribusi pada pilar pembangunan berkelanjutan dengan menjamin bahwa standar pelayanan publik tetap terjaga kualitasnya terlepas dari dinamika kontestasi politik lokal.

Kontribusi terbaru dari penelitian ini adalah penemuan konsep "Resiliensi Inovasi Berbasis Desa". Jika selama ini literatur inovasi publik lebih banyak berfokus pada efisiensi di level manajerial perkotaan, temuan ini memberikan sumbangan pemikiran bahwa kedaulatan data di tingkat desa (melalui Smart Kampung) adalah kunci utama menuju resiliensi nasional. Strategi ini menjadi solusi atas masalah klasik "digital divide" yang sering kali menghambat agenda transformasi nasional. Dengan meletakkan teknologi sebagai instrumen penguatan fungsi desa, Banyuwangi telah menggeser paradigma dari sekadar penggunaan teknologi (utilitarian) menjadi penguatan nilai publik yang inklusif (*normative*). Hal ini sejalan dengan konsep *Public Value* dari Moore (2021) yang menegaskan bahwa ketangguhan sebuah sistem administrasi diukur dari kemampuannya bertahan dalam jangka panjang sembari terus menghasilkan manfaat yang relevan bagi konstituenya.

Dalam kaitannya dengan Indonesia Emas 2045, model Banyuwangi menawarkan strategi "Pembangunan dari Pinggiran" yang bersifat konkret dan teknokratis. Jika visi 2045 mengamanatkan transformasi digital nasional yang menyeluruh, maka pengalaman Banyuwangi memberikan bukti empiris bahwa teknologi dapat digunakan untuk memperkuat kedaulatan data desa tanpa menghilangkan kearifan lokal. Sumbangan pemikiran strategis yang dihasilkan dari analisis ini adalah formulasi "Model Akselerasi 45-Local", yaitu kerangka kerja di mana target-target makro nasional didekonstruksi menjadi indikator capaian mikro di tingkat desa melalui bantuan artificial intelligence dan big data lokal.

Lebih lanjut, naskah ini menawarkan solusi atas tantangan disintegrasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Kontribusi orisinal dari penelitian ini menegaskan bahwa keberlanjutan inovasi tidak hanya membutuhkan legitimasi hukum, tetapi juga legitimasi sosial melalui *public value co-production*. Inovasi yang berkualitas bukan sekadar tentang seberapa canggih teknologi yang digunakan, melainkan seberapa mampu teknologi tersebut memanusiakan warga dalam proses pelayanan publik. Penemuan ini menjadi kritik sekaligus solusi bagi pengembangan ilmu administrasi publik di Indonesia: bahwa transformasi menuju 2045 harus berbasis pada "kemanusiaan digital" (*digital humanism*), di mana inovasi teknologi selalu selaras dengan peningkatan kualitas hidup manusia di tingkat lokal yang paling dasar.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa transformasi inovasi pelayanan publik di Kabupaten Banyuwangi bukan sekadar bentuk digitalisasi administratif, melainkan sebuah konvergensi strategis antara inovasi digital, organisasional, dan proses yang berorientasi pada penciptaan nilai publik (*public value*). Melalui metode *Systematic Literature Review* (SLR), ditemukan bahwa keberhasilan Banyuwangi dalam mempertahankan konsistensi inovasinya didorong oleh pelembagaan inovasi yang kuat, kepemimpinan transformasional yang adaptif, dan integrasi ekosistem pelayanan hingga ke tingkat desa melalui program Smart Kampung. Model ini terbukti efektif dalam mengakselerasi capaian target-target *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya pada pilar kesehatan, pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif. Kontribusi teoretis dari penelitian ini menegaskan bahwa keberlanjutan inovasi di era disrupsi memerlukan pergeseran dari tata kelola yang bersifat birokratis-sentralistik menuju *Digital Era Governance* (DEG) yang bersifat kolaboratif dan holistik. Secara praktis, pengalaman Banyuwangi memberikan cetak biru bagi strategi "Pembangunan dari Pinggiran" yang

relevan dengan pilar transformasi tata kelola dalam Visi Indonesia Emas 2045. Kemandirian data di tingkat lokal dan digitalisasi yang memanusiakan warga menjadi kunci bagi resiliensi nasional di masa depan. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah pusat maupun daerah lain melakukan replikasi model pelebagaan inovasi Banyuwangi dengan menyesuaikan pada karakteristik kearifan lokal masing-masing. Strategi akselerasi menuju 2045 harus menempatkan desa sebagai basis utama transformasi digital guna memitigasi ketimpangan pelayanan. Keterbatasan penelitian ini terletak pada ketergantungan pada data sekunder literatur; oleh karena itu, studi masa depan diharapkan dapat melakukan analisis komparatif antar-daerah secara empiris guna menguji skalabilitas model ini dalam konteks geografis dan sosiopolitik Indonesia yang lebih luas.

Acknowledgment

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Nasional (UNAS) atas dukungan institusional dan administratif yang diberikan selama pengembangan penelitian ini. Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atas lingkungan akademik yang memungkinkan eksplorasi inovasi tata kelola dan studi transformasi pelayanan publik. Karya ini merupakan bagian dari komitmen yang lebih luas untuk berkontribusi pada wacana Indonesia Emas 2045.

DAFTAR PUSTAKA

- Aneta, Y., Akib, H., Padungge, A. W., Pakaya, R., & Hulinggi, P. A. (2025). The Impact of Digital Transformation and Artificial Intelligence on Bureaucratic Culture Between Efficiency and Discretion. *KnE Social Sciences*, 10(4). <https://doi.org/10.18502/kss.v10i4.18019>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4). <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Anwar, Setiawan Pamungkas, T., Wicaksono, G., & Suharsono, A. (2018). Inovation of Local Village Budgeting Management: “The Case Study of Banyuwangi Regency Electronic Village Budgeting.” *International Seminar Series On Regional Dynamic*.
- Bass, B.M & Avolio, B. J. (1994). Improving organizational effectiveness through transformational leadership. In *The Journal of Academic Librarianship* (Vol. 21, Number 3).
- Bogoevska, N. (2019). Administrative reforms of the European social protection systems: trends and challenges. *Годишен Зборник На Филозофскиот Факултет/The Annual of the Faculty of Philosophy in Skopje*, 72. <https://doi.org/10.37510/godzbo1972403b>
- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2016). The new public service: Serving, not steering. In *The New Public Service: Serving, Not Steering*. <https://doi.org/10.4324/9781315289496>
- Dunleavy, P., Margetts, H., Bastow, S., & Tinkler, J. (2006). *Digital Era Governance*: Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199296194.001.0001>
- Efil, A. A., Alfitri, A. R., Aulia, G. A., & Nafi’ah, B. A. (2025). Evaluasi Keberhasilan Penerapan Inovasi Suroboyo (Inovboyo) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Dan Daya Saing Daerah. *JOSH: Journal of Sharia*, 4(02). <https://doi.org/10.55352/josh.v4i02.1866>
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1). <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Farizi, S., & Nuari Harmawan, B. (2020). Kota Cerdas di Era Pandemi: Inovasi Smart Kampung Banyuwangi Menyambut New Normal. In *Optimisme Melampaui Musibah Pandemi: Antisipasi Kebijakan Publik Pasca Pandemi*.

- Fukuyama, F. (2001). Third World Quarterly Social capital, civil society and development Social capital, civil society and development. *Third World Quarterly*, 22(1).
- Hendra, O., Prasojo, E., Fathurrahman, R., & Pilbeam, C. (2024). Vertical-horizontal Actor Collaboration in Governance Network: A Systematic Review. *Public Organization Review*, 24(4). <https://doi.org/10.1007/s11115-024-00794-w>
- Idowu Sulaimon Adeniyi, Nancy Mohd Al Hamad, Ololade Elizabeth Adewusi, Chika Chioma Unachukwu, Blessing Osawaru, Chisom Nneamaka Onyebuchi, Samuel Ayodeji Omolawal, Aderonke Omotayo Aliu, & Isiah Oden David. (2024). Organizational culture and leadership development: A human resources review of trends and best practices. *Magna Scientia Advanced Research and Reviews*, 10(1). <https://doi.org/10.30574/msarr.2024.10.1.0025>
- Jain, P., Agrawal, G., Rajput, S., & Singh, S. K. (2020). Exploring the factors affecting digital financial inclusion for socio-economic empowerment. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(8 Special Issue).
- Janssen, M., & Estevez, E. (2013). Lean government and platform-based governance-Doing more with less. *Government Information Quarterly*, 30(SUPPL. 1). <https://doi.org/10.1016/j.giq.2012.11.003>
- Lemos, M. C., & Agrawal, A. (2006). Environmental governance. *Annual Review of Environment and Resources*, 31.
- Lukman, S., & Hakim, A. (2024). Agile Governance, Digital Transformation, and Citizen Satisfaction Moderated by Political Stability in Indonesia's Socio-Political Landscape. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 11(1). <https://doi.org/10.29333/EJECS/2001>
- Luna, A. J. H. de O., Marinho, M. L. M., & de Moura, H. P. (2020). Agile governance theory: operationalization. *Innovations in Systems and Software Engineering*, 16(1). <https://doi.org/10.1007/s11334-019-00345-3>
- Mazy, T., M Kolopaking, L., Hadi Dharmawan, A., Ridho Nurrochmat, D., & Satria, A. (2022). Neue-Gemeinschaft: Digital Transformation of Micro, Small and Medium Enterprises among Rural Community in Banyuwangi, East Java. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 10(1). <https://doi.org/10.22500/10202238533>
- Moore, M. H. (2021). Creating public value: The core idea of strategic management in government. In *International Journal of Professional Business Review* (Vol. 6, Number 1). <https://doi.org/10.26668/businessreview/2021.v6i1.219>
- Muslimin, M. I., Nusamuda Pratama, I., Ardiani, Y., Rahmania, S., Anjani, H., Imara, I. S., Jeriyah, A., & Samunawardin, M. (2025). Efisiensi Dan Efektivitas Perencanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Di Era Digital: Studi Terhadap Transformasi Digitalisasi Fiskal Di Indonesia. *Nusantara Hasana Journal*, 4(9).
- Noya, J. (2025). Integrasi Kebijakan Sosial dan Tata Kelola Administrasi Publik: Studi Kasus Program Perlindungan Sosial di Indonesia. *JURNAL BADATI*, 7(1).
- Nurlina, N., Rosani, M., Lestari, N. D., Valianti, R. M., & Kristiawan, M. (2022). The influence of organizational culture and leadership on principal's organizational commitment. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 8(1). <https://doi.org/10.29210/020221610>
- Osborne, S. P. (2018). From public service-dominant logic to public service logic: are public service organizations capable of co-production and value co-creation? In *Public Management Review* (Vol. 20, Number 2). <https://doi.org/10.1080/14719037.2017.1350461>

- Osborne, S. P., & Radnor, Z. (2016). The New Public Governance and Innovation in Public Services: A Public Service-Dominant Approach. In Enhancing Public Innovation by Transforming Public Governance (Number 2013).
- Prasodjo, T. (2025). Rethinking Bureaucracy in the Digital Era: A Qualitative Review of Public Sector Transformation in Indonesia. *Golden Ratio of Social Science and Education*, 5(2). <https://doi.org/10.52970/grsse.v5i2.1425>
- Riska Farisa, B. M., Prayitno, G., & Dinanti, D. (2019). Social Capital and Community Participation on Infrastructure Development in Pajaran Village, Malang Regency Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 239(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/239/1/012046>
- Sachs, J. D., Schmidt-Traub, G., Mazzucato, M., Messner, D., Nakicenovic, N., & Rockström, J. (2019). Six Transformations to achieve the Sustainable Development Goals. *Nature Sustainability*, 2(9). <https://doi.org/10.1038/s41893-019-0352-9>
- Souza Pimenta, M. C. B., Suarez, M. A. G., & Ferreira, M. A. (2021). Hybrid governance as a dynamic hub for violent non-state actors: Examining the case of Rio de Janeiro. *Revista Brasileira de Política Internacional*, 64(2). <https://doi.org/10.1590/0034-7329202100207>
- Wiriyanto, B., Hidayat, R., & Mastika, K. (2020). Transforming Local Government with Innovative Leadership: An Evidence from Banyuwangi, East Java. *Regional Dynamic: Journal of Policy and Business Science*, 1(1). <https://doi.org/10.19184/rdjpbs.v1i1.17466>
- Ziadlou, D. (2021). Strategies during digital transformation to make progress in achievement of sustainable development by 2030. *Leadership in Health Services*, 34(4). <https://doi.org/10.1108/LHS-08-2020-0056>